

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2013, Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping pertama kali mendeklarasikan pembangunan jalur sutra *modern*. Deklarasi ini diberikan ketika beliau mengunjungi sebuah seminar di Astana, Kazakhstan. Inisiatif jalur sutra *modern* inilah yang kita kenal sebagai *One Belt One Road* (OBOR). Tujuan dibentuknya jalur sutra modern ini yaitu untuk mempermudah jalur perdagangan antara China dengan negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa. Demi tercapainya mega proyek ini, China rela menggelontorkan uangnya senilai kurang lebih Rp.1.649 Triliun untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan di berbagai negara yang dilewati oleh proyek ini. Mega proyek *One Belt One Road* (OBOR) ini memiliki dua jalur perdagangan. Pertama, jalur darat yang membentang sepanjang Asia Timur, Asia Tengah hingga Eropa yang diberi nama Jalur Sutra Sabuk Ekonomi (*Silk Road Economic Belt*). Kedua, jalur perdagangan laut (*21st Century Maritime Silk Road*) yang membentang dari China, Asia Tenggara hingga Asia Selatan. Nantinya jalur perdagangan laut ini akan melewati Laut China Selatan, Samudra Hindia, Teluk Persia, Laut Merah, hingga Teluk Aden (Sari R. , 2017, pp. 13-14).

Setelah deklarasi yang diberikan Xi di Kazakhstan, beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Oktober 2013 saat pertemuan APEC di Bali, Indonesia, Xi juga menerangkan bahwa untuk mendukung tercapainya proyek ini, maka akan dibantu oleh lembaga keuangan yang bernama *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Lembaga keuangan

ini nantinya akan membantu pembiayaan pembangunan atau “*upgrading*” infrastruktur maupun sumber daya di negara-negara yang dilewati proyek OBOR (Kartini, 2015, p. 136).

Sebagai salah satu bentuk realisasi mega proyek OBOR di kawasan Asia Selatan, China melalui Perdana Menteri Li Keqiang pada kunjungannya ke Pakistan tanggal 22-23 Mei 2013 mengusulkan pembentukan suatu kerjasama dengan Pakistan dalam bidang ekonomi untuk mempermudah distribusi barang maupun jasa antara kedua negara maupun bagi negara-negara tetangga yang mau bergabung dalam proyek kerjasama ini. Proyek ini dinamakan *China Pakistan Economic Corridor* (CPEC) atau Koridor Ekonomi China-Pakistan (Ranjan, 2015, p. 1). *China Pakistan Economic Corridor* (CPEC) ini nantinya akan menghubungkan wilayah Kashgar di Provinsi Xinjiang China menuju Pelabuhan Gwadar di Barat Daya Pakistan melalui Gilgit-Baltistan di wilayah administrasi Khasmir Pakistan. Panjang koridor China-Pakistan ini kira-kira mencapai 3000 km. Dalam kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Pakistan pada bulan April 2015, beliau dan Presiden Pakistan Mamnun Hussain menandatangani nota kesepakatan senilai US\$ 46 Milyar (Samosir, 2017, p. 2). Total jumlah perjanjian dan kontrak yang ditandatangani kedua negara adalah 51 proyek. Perkembangan proyek ini dinilai akan mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial kedua negara (Shulin, 2015, p. 166). Proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalur kereta api cepat, dan jalan tol. Selain itu, proyek ini juga akan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada di Pakistan. Di dalam proyek CPEC ini salah satu proyek yang dinilai penting adalah pembangunan Pelabuhan Gwadar. Bagi Pakistan, Pelabuhan Gwadar ini sangatlah penting Pelabuhan tersebut sebagai kunci atau akses bagi negara-negara tetangga sekitar Pakistan untuk mengakses lautan. Negara tetangga Pakistan yang sangat membutuhkan akses ke laut melalui Pelabuhan Gwadar ini diantaranya adalah negara-negara di kawasan Asia Tengah seperti Uzbekistan,

Turkmenistan, Afghanistan, dan negara-negara Asia Tengah lainnya. Alasan lain yang melatarbelakangi adalah letak Pelabuhan Gwadar yang berkisar 400 km dari Selat Hormus dan 72 km dari perbatasan Iran membuat Pelabuhan Gwadar ini menjadi penting bagi Pakistan. Proyek ini dinilai sangat berharga, sehingga kedepannya Pakistan berharap negaranya akan menjadi pusat perdagangan di kawasan tersebut dan menjadi penghubung ekonomi serta pelabuhan terbaik di Laut Arab (Shulin, 2015, p. 167).

Selain dari sisi ekonomi, proyek CPEC ini juga sangat bermanfaat bagi Pakistan terutama dalam hal keamanan nasional. Dengan terlaksananya proyek ini tentu akan membuat banyak pekerja China datang ke Pakistan untuk membangun infrastruktur seperti jalur kereta api maupun jalan raya. Dengan semakin banyaknya orang China yang datang ke Pakistan, tentu pemerintah China itu sendiri akan berusaha menjamin keamanan warga negaranya dengan mendatangkan pasukan keamanan China. Kedatangan pasukan keamanan China bagi Pakistan adalah sebuah keuntungan karena dapat menjadi '*a safe cover*' atau sebuah pelindung dari serangan India, terutama di wilayah yang masih menjadi persengketaan dengan India. Selain itu proyek CPEC juga membantu Pakistan untuk keluar dari ketergantungan bantuan Amerika Serikat (Goswami, 2017, p. 38).

Bagi China, proyek ini tak kalah pentingnya dengan proyek OBOR lainnya. Selain mempermudah akses China menuju Lautan Hindia, proyek CPEC ini juga menjadi rute alternatif China untuk mendistribusikan barang-barang impor maupun ekspornya selain melewati Selat Malaka. Selama ini kita tahu bahwa untuk mendistribusikan barang dari China maupun menuju China, rute yang sering dilewati adalah Selat Malaka. Oleh karena itu, Selat Malaka menjadi salah satu selat tersibuk di dunia. Dengan adanya pembangunan koridor ini, diharapkan akan mengurangi jarak perjalanan sebanyak 10.000 km dibandingkan ketika melewati Selat Malaka. Hal ini tentu

membuat China sangat antusias apalagi kita tahu bahwa di Selat Malaka selain banyak terjadi perampokan di laut, juga terjadi perebutan pengaruh antara China dengan Amerika Serikat (Goswami, 2017, p. 38). Oleh karena itu, dengan adanya proyek CPEC ini lebih mempermudah China untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan yaitu akses terefektif menuju daratan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Selain itu dari segi politik, CPEC ini juga akan membuat akses dan membuka pasar bagi Provinsi Xinjiang, China yang selama ini memiliki hubungan yang lemah dengan Partai Komunis China (Goswami, 2017, p. 38). Harapannya dengan adanya proyek ini akan membuat hubungan antara Provinsi Xinjiang dengan pemerintah pusat China menjadi lebih harmonis.

Secara tidak langsung pembangunan koridor ekonomi ini juga bermanfaat bagi negara-negara lain terutama bagi negara sekitar koridor yang membutuhkan akses lautan seperti negara-negara di Asia Tengah yang selama ini terisolir karena hanya memiliki wilayah daratan saja. Selain itu negara-negara di kawasan Asia Timur, Afrika, dan Eropa juga merasa dimudahkan dengan adanya koridor ekonomi di wilayah ini.

Meskipun banyak negara yang mendukung dibangunnya proyek ini, namun ada negara yang merasa keberatan bahkan merasa terancam dengan adanya proyek ini. Salah satunya adalah India yang merupakan tetangga terdekat Pakistan. Pada tanggal 14 April 2014, disela-sela pertemuan bilateral ke enam putaran dialog strategis antara India dan China, Sekretaris Luar Negeri India, Sujatha Singh mengatakan bahwa,

'We have raised this issue and raised our concerns not only in this time, we have made them know earlier. They had noted concern.' (Ranjan, 2015, p. 14).

Perhatian atau *concern* yang dimaksud oleh Sekretaris Luar Negeri India tersebut adalah permasalahan mengenai

proyek *China Pakistan Economic Corridor* (CPEC) yang melewati wilayah perbatasan India-Pakistan yang selama ini menjadi sengketa sejak keduanya merdeka pada tahun 1947.

Sebelumnya India memang pernah memutuskan untuk ikut terlibat di dalam proyek OBOR. Hal ini terlihat dari keikutsertaan India dalam lembaga keuangan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) (Setiawan A. , 2017). Selain itu India juga memiliki koridor ekonomi bersama China yang diberi nama *Bangladesh China India Myanmar Economic Corridor* (BCIMEC). Baik BCIMEC maupun CPEC adalah sama-sama bagian dari mega proyek *One Belt One Road* (OBOR) (Ranjan, 2015, p. 2).

Pada bulan Juni 2015, dua bulan setelah Presiden Xi Jinping mengumumkan untuk berinvestasi terhadap proyek CPEC senilai US\$ 46 milyar, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengatakan kepada China bahwa proyek CPEC ini, “*unacceptable*” atau tidak dapat diterima (Shah, 2017). Pada bulan September 2016 pada pertemuan G-20 di Hangzhou, Perdana Menteri India Narendra Modi pun menyampaikan kekhawatirannya pada proyek koridor ekonomi China Pakistan ini secara bilateral dengan Presiden Xi Jinping (Pandit, 2017). Meskipun India belakangan ini secara tegas mengatakan tidak akan mengambil bagian dari mega proyek OBOR yang disampaikan melalui media lokalnya. Namun pemerintah China berpandangan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur di Pakistan. China juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan memaksakan negara manapun untuk ikut dalam proyek OBOR apabila mereka memang beranggapan proyek ini merugikan mereka. Hal ini pun berlaku bagi pemerintah India yang tidak ingin terlibat dalam proyek OBOR (Sutrisno, 2017).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah “**Bagaimana strategi India dalam merespon proyek**

kerjasama *China-Pakistan Economic Corridor* Tahun 2014-2017?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai *China Pakistan Economic Corridor* (CPEC).
2. Untuk mengetahui alasan mengapa India merasa terancam dengan adanya kerjasama *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC).
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi India dalam merespon proyek kerjasama *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC).

D. Kerangka Berpikir

Penulis menggunakan Tipologi Strategi Politik Luar Negeri dan Konsep *Balance of Power* untuk membantu menjelaskan strategi yang digunakan India dalam merespon adanya proyek kerjasama *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). Konsep tersebut digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Tipologi Strategi Politik Luar Negeri

Menurut John Lovell, strategi politik luar negeri suatu negara yang akan menerapkan atau mengembangkan kebijakan luar negerinya dapat dijelaskan dengan cara memahami dan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi yang dimiliki lawan dan perkiraan mereka atas kemampuan diri mereka sendiri. Dengan menyilangkan dua komponen tersebut, maka dihasilkanlah empat tipe strategi yaitu konfrontatif, kepemimpinan, akomodatif dan konkordan. Berikut adalah skema tipologi menurut John Lovell (Masood, 1990, p. 190).

		<u>Penilaian Tentang Strategi Lawan</u>	
		<u>Mengancam</u>	<u>Medukung</u>
<u>Perkiraan Kemampuan Sendiri</u>	<u>Lebih Kuat</u>	<u>Konfrontasi</u>	<u>Kepemimpinan</u>
	<u>Lebih Lemah</u>	<u>Akomodatif</u>	<u>Konkordan</u>

Gambar 1.1 Tipologi Strategi Politik Luar Negeri Menurut John Lovell

Sumber : Masoed.(1990)

Pada dasarnya tipologi yang dibuat oleh John Lovell ini menjelaskan bahwa hasil atau produk dari strategi politik luar negeri suatu negara merupakan perhitungan untung rugi. Dengan melihat kemampuan diri sendiri dan strategi yang dimiliki lawan akan berpengaruh terhadap keputusan strategi mana yang akan diambil oleh negara tersebut. Keputusan strategi yang akan digunakan memungkinkan untuk meminimalisir kerugian dan resiko yang akan didapat oleh negaranya. Dari gambar tersebut telah kita ketahui bahwa ada empat strategi kebijakan yang dihasilkan, yaitu:

a. Konfrontatif

Konfrontatif adalah kebijakan dengan sikap penentangan atau penciptaan secara berhadap-hadapan. Konfrontatif ini terjadi apabila suatu negara merasa bahwa dirinya lebih kuat daripada lawannya. Selain itu, sikap dari pada lawan dari negara tersebut dinilai dapat mengancam keamanan negaranya. Oleh karena itu, negara mengambil kebijakan konfrontatif. Bentuk dari kebijakan konfrontatif ini pun bermacam-macam diantaranya memberikan sanksi embargo, pemutusan hubungan diplomatik, perang, maupun membuat aliansi dengan negara lain guna menambah kekuatan yang telah dimiliki negara tersebut.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan yaitu terbentuknya sifat superioritas yang dimiliki oleh pihak yang lebih kuat untuk memimpin pihak yang lebih lemah dan mendukung. Sangat jelas sekali bahwa sifat ini muncul ketika suatu negara merasa dirinya lebih kuat dan berkuasa dibandingkan dengan negara yang dihadapinya. Namun bedanya dengan konfrontasi adalah negara lawan bersikap tidak mengancam namun justru mendukung negara tersebut. Oleh karena itu munculah strategi kepemimpinan.

c. Akomodatif

Akomodatif adalah pemenuhan tuntutan dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang berseberangan. Sikap akomodatif ini diambil oleh negara yang merasa dirinya tidak memiliki kemampuan yang cukup dibandingkan oleh negara lawan yang sikapnya mengancam. Oleh karena itu, kebijakan akomodasi ini diambil agar negara tersebut dapat meminimalisir resiko yang dapat terjadi akibat sikap mengancam yang diberikan oleh pihak lawan.

d. Konkordan

Konkordan atau pengikutan melalui kerjasama adalah langkah pengikutan pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat melalui kerjasama. Sikap konkordan ini muncul karena suatu negara merasa dirinya lebih lemah dibandingkan dengan pihak lawan, namun pihak lawan bukan menunjukkan sikap mengancam melainkan justru sikap mendukung. Oleh karena itu negara tersebut mengambil keputusan untuk berkerjasama dengan pihak lawan.

Seperti penjelasan di atas, suatu negara akan menerapkan strategi konfrontasi terhadap pihak lawan apabila negara tersebut merasa lebih kuat dibandingkan negara yang dihadapinya, serta merasa adanya sikap mengancam yang

ditunjukkan oleh negara lawan terhadap negaranya. Hal ini pun tak jauh berbeda dengan yang dialami oleh India. Apabila kita lihat dalam kasus yang dibahas di dalam skripsi ini mengenai strategi India dalam merespon proyek CPEC, maka dapat kita ketahui bahwa sikap yang diambil India adalah konfrontatif. Hal ini didasari oleh beberapa alasan diantaranya; pertama, dari segi penilaian strategi lawan, India merasa pihak lawan yaitu Pakistan bersama China telah membangun proyek ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungan hidup India baik dari segi keutuhan wilayah, ekonomi maupun dari segi keamanan. Dari segi keutuhan wilayah, proyek CPEC ini telah melewati wilayah yang dipersengketakan antara India dan Pakistan yaitu wilayah Kashmir. Dari segi ekonomi India pun merasa terancam dengan keberadaan CPEC karena India khawatir terjadinya perebutan gelar Macan Asia antara China dan India dan dalam memperebutkan pasar di wilayah Asia. Dari segi keamanan, India khawatir bahwa dengan keberadaan CPEC maka pasukan keamanan China dapat masuk ke wilayah Pakistan dan menjadi '*a safe cover*' bagi Pakistan untuk melindungi diri dari serangan India.

Kemudian jika dari segi penilaian terhadap kemampuan diri sendiri, India merasa dirinya sama kuatnya atau bahkan lebih kuat jika dibandingkan Pakistan dan China. Hal ini di lihat dari segi politik, ekonomi maupun militer. Meskipun saat ini China lebih kuat dibandingkan dengan India, namun India juga memiliki sekutu dibelakangnya yang sama kuatnya dengan China. Sekutu India yang dimaksud adalah Amerika Serikat dan Jepang. Maka dari itu India merasa bahwa dirinya sebanding atau bahkan lebih kuat dibandingkan dengan Pakistan dan China.

2. Konsep *Balance of Power*

Menurut Morgenthau *balance of power* adalah aspirasi negara-negara untuk mendapatkan *power*, mempertahankan dan menumbangkan *status quo* dan membuat konfigurasi *power* yang bertujuan untuk mencapai kestabilan sistem

(Morgenthau, 2010, pp. 199-200). Strategi yang digunakan untuk menyeimbangkan *power* atau *balancing* ini bisa dilakukan di tingkat internasional maupun regional dan bertujuan untuk mencegah adanya suatu tindakan hegemoni dari negara tertentu (Paul, Wirtz, & Fortmaan, 2004, p.2).

Kemudian strategi perimbangan ini dapat diikuti dengan tiga cara diantaranya *hard balancing*, *soft balancing*, dan *asymmetric balancing*. *Hard balancing* adalah strategi yang dilakukan pada saat adanya kemungkinan konflik besar, kemudian beberapa negara secara formal dapat bersatu atau bersama-sama dengan sengaja untuk memperoleh senjata yang lebih besar. *Soft balancing* adalah strategi yang dilakukan lebih terkendali, bertujuan untuk mencegah ancaman dengan cara produksi senjata yang terbatas, pendekatan yang dikembangkan hati-hati oleh beberapa negara yang membuat organisasi atau forum, maupun aliansi informal dalam sikap pencegahan. Kemudian *asymmetric balancing* adalah strategi yang dilakukan ketika sebuah negara mulai mensponsori organisasi non-pemerintah seperti teroris, untuk menyebabkan gangguan di negara yang dapat mengancam keamanan mereka (Gabriel & Carvalho, 2018, p. 118). Kemudian dalam buku Michael Sheehan yang berjudul *The Balance of Power History and Theory* menyebutkan bahwa,

“Apabila ada suatu negara atau suatu blok negara yang dinilai terlalu menjadi kuat, maka akan dinilai oleh negara lain sebagai ancaman bagi keamanan negara lain tersebut dan mereka akan meresponnya dengan usaha perimbangan kekuatan. Usaha tersebut dilakukan baik sendiri maupun dengan bantuan negara lain yaitu yang sering disebut sebagai aliansi guna meningkatkan kekuatannya” (Montratama & Yani, 2017).

Joseph Nye dalam bukunya menjelaskan bahwa aliansi bagi kaum realis di klaim mampu menjaga *balance of power*,

dan dengan aliansi tersebut negara-negara tidak akan saling serang (Nye, 2009). Aliansi sendiri menurut Nye adalah “*Formal or informal arrangements between sovereign states, usually to ensure mutual security*” (Nye, 2009). Hal ini bermakna bahwa aliansi adalah sebuah hubungan antara negara-negara berdaulat yang dibuat berdasarkan kesepakatan tertentu yang bersifat formal ataupun non formal untuk meningkatkan keamanan bersama. Formal adalah ketika kesepakatan tersebut ditanda-tangani oleh negara-negara yang terlibat secara terbuka atau terang-terangan. Sedangkan non formal adalah kesepakatan yang tidak dilakukan terang-terangan namun sifatnya rahasia dan hanya diketahui oleh kepala negaranya saja (Nye, 2009).

Berdasarkan konsep *balance of power* yang telah disebutkan oleh para ahli tersebut maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila suatu negara merasa terancam akan adanya hegemoni yang kuat dari negara lain atau blok negara lain, maka negara yang merasa terancam tersebut akan melakukan upaya perimbangan kekuatan atau yang kita sebut sebagai *balance of power*. Cara yang dilakukan dapat berupa *hard*, *soft*, maupun *asymmatric*. Kemudian, bentuk dari *balance of power* tersebut dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan negara lain yang disebut sebagai aliansi.

Oleh karena itu, adanya ancaman yang dihadapi oleh India dalam hal ini adalah proyek CPEC yang merupakan sebuah proyek antara China dan Pakistan, maka India merasa perlu untuk melakukan usaha guna mengimbangi proyek yang dibuat China dan Pakistan tersebut. Usaha perimbangan yang dilakukan India yaitu dengan cara *soft balancing* yaitu membentuk aliansi bersama Jepang yang diberi nama *Asia Africa Growth Corridor* (AAGC). Proyek tandingan yang dibuat India bersama Jepang ini diharapkan mampu menandingi CPEC dan melindungi kepentingan nasional India yang sebelumnya merasa terancam dengan adanya proyek CPEC.

E. Hipotesis

Strategi India dalam merespon proyek kerjasama *China Pakistan Economic Corridor* (CPEC) secara konfrontatif yaitu dengan membangun proyek kerjasama tandingan bersama Jepang yang disebut *Asia-Africa Growth Corridor* (AAGC) atau Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika. AAGC adalah koridor perdagangan yang dibuat atas inisiatif India dan Jepang guna mendukung pertumbuhan di Afrika serta tentu saja untuk menghalau hegemoni China yang semakin lama semakin kuat di wilayah tersebut, terutama setelah adanya proyek CPEC.

F. Batasan Penelitian/Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam skripsi ini yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Diawali dari tahun 2014 karena pada tahun ini merupakan awal mula India memberikan pernyataan tentang perhatiannya terhadap CPEC melalui sekteraris luar negerinya. Sedangkan tahun 2017 adalah waktu dimana Sistem Penelitian di Negara Berkembang bersama dengan Institut Riset Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur dan Institut dari *Developing Economies Japan External Trade Organization* merilis sebuah dokumen mengenai visi AAGC (Dieda, 2017). Penelitian ini difokuskan pada upaya atau strategi India dalam menghadapi proyek *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC).

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan situasi atau kenyataan yang ada dengan didukung oleh tipologi dan konsep yang telah dijelaskan dalam kerangka berfikir. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *library research* atau kepustakaan. Dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari buku, jurnal, berita, maupun sumber-sumber dari internet lainnya yang dianggap memiliki sumber yang jelas dan terpercaya

serta memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi lima bab agar pembaca dapat memahami dengan jelas dan teratur, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi delapan sub-bab, diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : HUBUNGAN INDIA DENGAN CHINA DAN PAKISTAN

Pada bab yang membahas mengenai hubungan India dengan China dan Pakistan ini terdiri dari lima sub-bab, diantaranya adalah pembahasan mengenai sistem politik, ekonomi, militer India, dan dinamika hubungan India dengan China dan Pakistan.

BAB III : *CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR*

Pada bab *China Pakistan Economic Corridor* ini terdiri dari empat sub-bab, diantaranya adalah sejarah pembentukan, proyek CPEC, manfaatnya bagi China dan Pakistan, serta CPEC sebagai ancaman bagi India.

**BAB IV : STRATEGI INDIA MERESPON CHINA
PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR
DENGAN CARA MENDIRIKAN ASIA
AFRICA GROWTH CORRIDOR**

Pada bab Strategi India Merespon *China Pakistan Economic Corridor* dengan Cara Mendirikan *Asia Africa Growth Corridor* terdiri dari tiga sub-bab, diantaranya adalah analisis strategi konfrontasi India dalam merespon CPEC dengan cara mendirikan AAGC, pembentukan *Asia-Africa Growth Corridor* (AAGC), perbandingan kekuatan AAGC dengan CPEC, serta respon negara lain terhadap pembentukan AAGC.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab kesimpulan ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab.